

Kesetaraan Gender dan Pembangunan di Indonesia

Oleh:
Chitrawati Buchori
and Lisa Cameron

Maret 2006



THE WORLD BANK

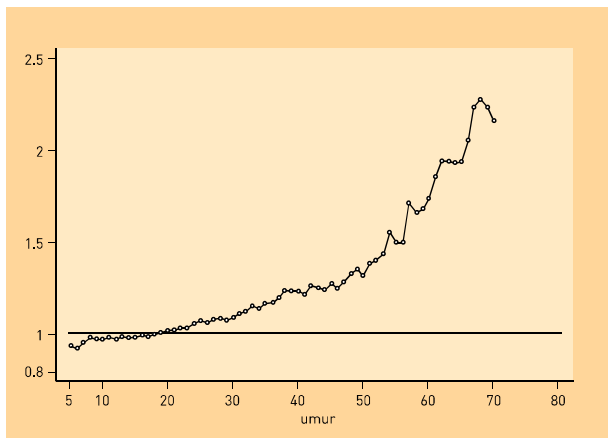
Kesetaraan Gender dan Pembangunan di Indonesia

Kemajuan signifikan yang mengarah pada pencapaian keseimbangan gender telah terjadi di beberapa sektor kunci

- Selama ini telah terjadi perbaikan yang stabil dan mengesankan dalam hal posisi relatif pendidikan perempuan. Bagi mereka yang saat ini berusia di bawah 20 tahun, perbedaan gender yang terjadi sangatlah kecil. Sedikit lebih banyak perempuan daripada lelaki yang terdaftar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hanya di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, terdapat lebih banyak lelaki yang mendapatkan pendidikan dibandingkan perempuan.

Perempuan yang berusia lebih tua tetap kurang tingkat pendidikannya dibandingkan laki-laki

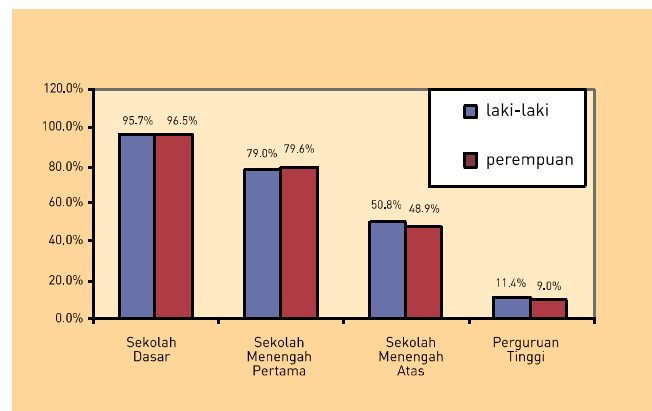
(Rasio Lamanya Bersekolah bagi Lelaki/ Perempuan Menurut Umur)



Sumber: Susenas 2002.

namun hanya terdapat sedikit perbedaan dalam tingkat pendaftaran sekolah saat ini...

(Tingkat Pendaftaran Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2002)

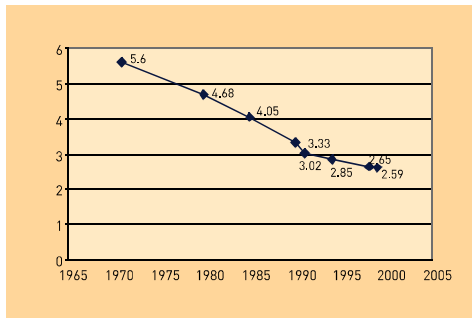


Sumber: Susenas 2002.

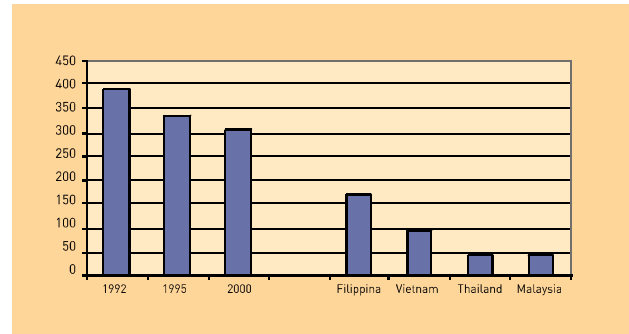
- Kemajuan yang mengesankan telah dicapai dalam mengurangi angka kesuburan yang telah turun secara dramatis dari 5,6 kelahiran per perempuan di tahun 1971 menjadi 2,6 di tahun 2000. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari tingkat penggantian yang besarnya 2,1. Angka kematian ibu melahirkan diperkirakan 396 per 100.000 kelahiran di tahun 2001. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN.

Perempuan telah mendapatkan lebih banyak kontrol atas kesuburan mereka... (jumlah kelahiran per perempuan) **Kematian saat melahirkan telah turun (namun masih tinggi menurut standar internasional)**

(Jumlah Kelahiran per Perempuan)



(Kematian Saat Melahirkan per 100.000 kelahiran)



Sumber: ww.bps.go.id/sector/population/table7.shtml.

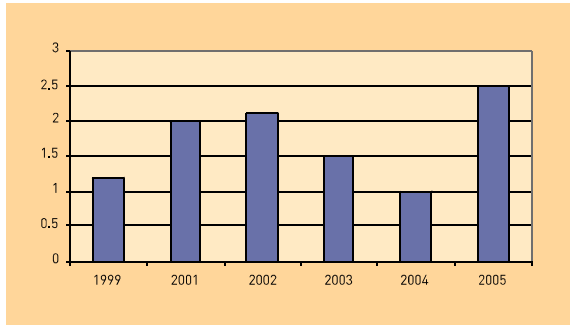
Sumber: UN Human Development Report 2003 and DHS 1994, 1997 and 2002.

Globalisasi dan desentralisasi mendatangkan kesempatan sekaligus tantangan lebih besar untuk pencapaian kesetaraan gender

- Migrasi ke luar negeri bukan hanya salah satu dari sumber kesempatan kerja terbesar dan terus menerus tumbuh untuk kaum miskin pedesaan, namun berperan juga sebagai satu dari mekanisme jaring pengaman yang dimanfaatkan kaum miskin untuk menghadapi kejutan ekonomi. Tiap tahunnya jumlah warga negara Indonesia yang tercatat pergi sebagai migran ke luar negeri adalah sekitar 400.000 orang, dan 80% diantaranya adalah perempuan. Sekitar 90% perempuan migran tersebut bekerja pada sektor informal, umumnya sebagai pembantu rumah tangga. Mayoritas pekerja laki-laki migran bekerja di sektor formal sebagai buruh bangunan.

Remitansi merupakan sumber penting bagi pendatangan devisa negara serta semakin menjadi sumber penghasilan bagi rumahtangga miskin pedesaan

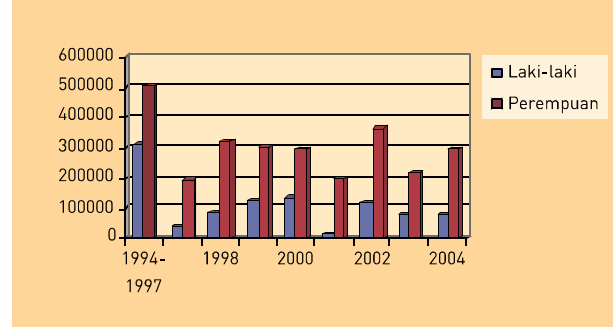
(Remitansi yang Diterima Indonesia dalam US\$ milyar)



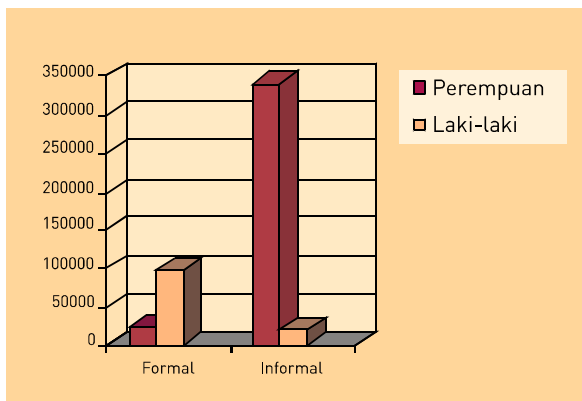
Sumber: Kliping dari beberapa surat kabar

Jumlah keseluruhan buruh migran terus meningkat setiap tahunnya dan jumlah perempuan melebihi laki-laki

(Jumlah Pekerja Migran Indonesia)



Sumber: www.tki.or.id



Migrasi ke luar negeri juga mendatangkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan hak asasi. Walaupun terasa berat bagi para pekerja migran Indonesia, persoalan tersebut terasa lebih menyulitkan pekerja migran perempuan karena sebagai pembantu rumah tangga, hubungan kerja dengan majikan mereka tidak diakui atau dilindungi. Para pekerja migran perempuan di luar negeri sangat rentan terhadap pelanggaran hak mereka selaku pekerja seperti perkosaan, pelecehan, pemotongan upah dan kondisi kerja yang buruk.

- Desentralisasi membuka kesempatan bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar, namun secara tidak langsung juga telah mengurangi partisipasi perempuan di pemerintahan. Pegawai negeri memiliki ketidakseimbangan gender pada tingkatan pangkat tinggi, terutama pada pangkat tinggi di pemerintahan daerah. Oleh karenanya ketika pembuatan keputusan di sektor publik diturunkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, maka tingkat partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan menjadi berkurang. Sejalan dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan, jumlah kabupaten/kota

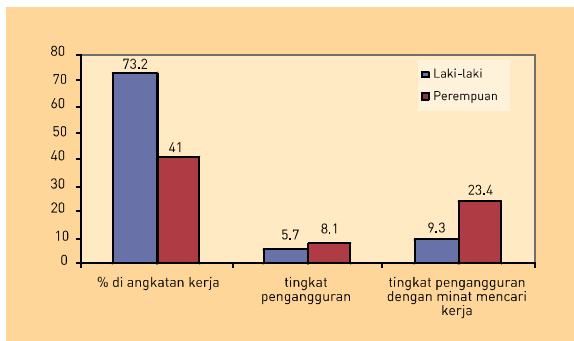
yang mengesahkan peraturan-peraturan daerah yang bias gender (misalnya Perda Maksiat), atau bahkan peraturan yang mendiskriminasikan perempuan, menunjukkan peningkatan. Perspektif gender yang rendah diantara pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga pembuat keputusan lainnya di daerah, mengakibatkan keluarnya kebijakan-kebijakan yang tidak peka gender walaupun kebanyakan dari kebijakan-kebijakan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan.

Namun demikian, diskriminasi angkatan kerja masih terlihat di seluruh wilayah

- Hanya 41% perempuan versus 73% lelaki yang bekerja atau mencari pekerjaan. Di pasar tenaga kerja, perempuan lebih cenderung tidak mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, angka statistik ini menyamarkan fakta bahwa banyak perempuan yang walaupun tidak secara aktif mencari kerja, namun berminat untuk bekerja. Perempuan terwakili secara berlebihan dalam pekerjaan-pekerjaan tanpa bayaran atau dengan bayaran rendah, dan kurang terwakili di dalam sektor formal yang berpenghasilan lebih baik.

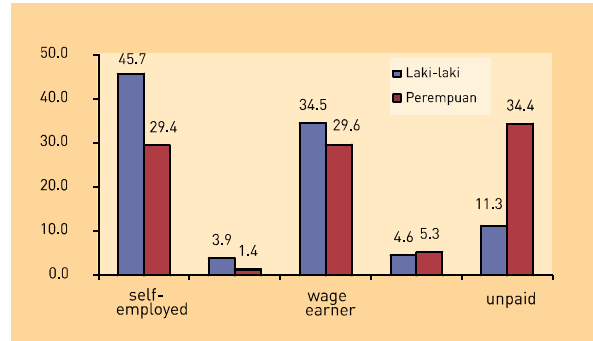
Perempuan lebih cenderung untuk tidak bekerja dibandingkan laki-laki, tapi lebih cenderung tidak mendapatkan pekerjaan

(Statistik Angkatan Kerja, persen)



Perempuan cenderung memiliki peluang yang lebih sedikit untuk bekerja di sektor formal dimana penghasilan paling tinggi

(Status Bekerja Menurut Jenis Kelamin)

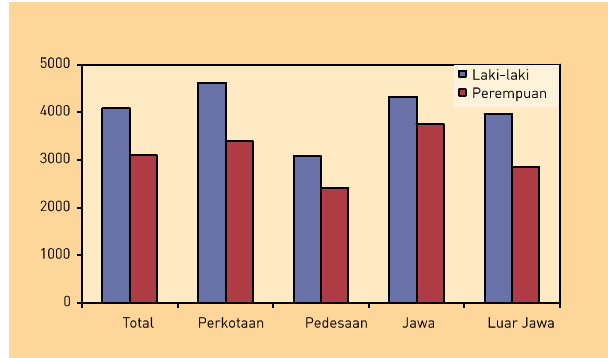


Sumber: Susenas 2002.

Bahkan di sektor formal, pekerja perempuan rata-rata hanya dibayar 76% dari penghasilan lelaki

(Upah Rata-rata per Jam Menurut Jenis Kelamin, Rp)

- Di sektor formal, perempuan menerima upah yang lebih rendah. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau pengalaman perempuan. Rata-rata, karyawan perempuan hanya menerima 76% dari penghasilan laki-laki. 80% dari perbedaan upah laki-laki dan perempuan disebabkan oleh timpangnya perlakuan terhadap perempuan. Seorang perempuan dengan pendidikan dan pengalaman yang persis sama dengan



Sumber: Susenas 2002.

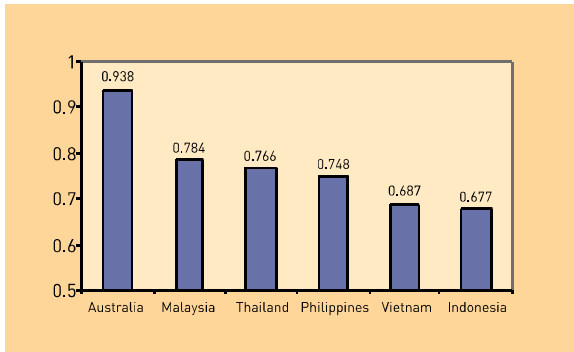
laki-laki rata-rata akan menerima sekitar 81% dari penghasilan yang diterima laki-laki. Perbedaan upah ini lebih besar di wilayah-wilayah luar Jawa dibandingkan Jawa, dan lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Dan kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut

- Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan lelaki dan seringkali mereka juga menjadi korban kekerasan di daerah-daerah konflik sipil dan militer. Aceh, Maluku, Poso, Papua dan Kalimantan Tengah adalah daerah-daerah dimana kekerasan sipil dan militer telah mempengaruhi kehidupan perempuan, lelaki dan anak-anak secara serius. Di Aceh, 1.694 perempuan menjadi janda selama operasi militer (DOM), dan 4.126 lainnya menjadi janda selama periode paska-DOM. Di Maluku, stigmatisasi menimpa perempuan hamil dan perempuan beranak yang dibuang keluarganya. Pada bulan Maret 2001, terdapat 1,1 juta pengungsi lokal dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
- Kekerasan berbasis gender dilaporkan semakin meningkat. Tercatat ada 5.163 kasus kekerasan di tahun 2002, naik sebesar 63% dari tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut termasuk pelecehan pada buruh migran perempuan, kekerasan dalam rumah tangga serta perbuatan kriminal. Data akhir tahun di Markas Besar Kepolisian Jakarta, misalnya, memperlihatkan bahwa kasus perkosaan yang dilaporkan telah meningkat secara signifikan sebesar 25% di tahun 2003 walaupun terdapat penurunan jumlah peristiwa kriminal di kota. Kekerasan dalam rumah tangga mengungguli kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lokal di Nusa Tenggara Barat. Persoalan ekonomi telah dituding sebagai penyebab meningkatnya jumlah kasus tersebut. Menurut Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), terdapat 43 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani organisasi tersebut di tahun 2000. Hal ini meningkat menjadi 70 kasus di tahun 2001 dan naik drastis menjadi 729 kasus di tahun 2002.

Kinerja Indonesia dalam menangani ketidaksetaraan gender tertinggal dari negara-negara tetangga

(Gender-Related Development Index-GDI)



Sumber: UN Human Development Report 2003.

Di tahun 2002, kinerja GDI¹ Indonesia menduduki peringkat 91 dari 144 negara. Hal ini disebabkan oleh karena angka harapan hidup perempuan 'dibebani' oleh tingkat melek aksara yang lebih rendah, yaitu 86% (dibandingkan 94% untuk lelaki), jumlah waktu rata-rata sekolah perempuan lebih pendek dari lelaki (6,5 berbanding 7,6 tahun), dan porsi penghasilan perempuan yang lebih kecil dari lelaki (38% berbanding 62%). Kinerja GDI diseluruh wilayah juga tidak beraturan dengan variasi yang signifikan, bahkan di antara dua kabupaten/kota yang bertetangga.

¹ Indeks pembangunan terkait gender mencerminkan perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam harapan hidup, tingkat melek aksara, tahun bersekolah dan penghasilan atau upah. Semakin tinggi tingkat perempuan dibandingkan laki-laki, semakin tinggi pula nilai indeks.